

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Perkembangan ilmu akuntansi, selain memberikan manfaat juga menjadi salah satu sumber masalah. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) di dunia marak terjadi akhir-akhir ini, dimana hal tersebut menjadi pusat perhatian berbagai media di dalam maupun di luar negeri. Pada sektor publik kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sektor swasta bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana. Kecurangan akuntansi aka menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang nyata atau sebenarnya.

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN agar dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistimatis.

Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia, kecurangan akuntansi berkembang secara luas yang menimbulkan kerugian yang sangat besar hampir diseluruh sektor. Kasus kecurangan akuntansi di Indonesia terjadi secara berulangulng. Menurut Wilopo (2006) dalam Shintadevi

(2015:115), pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi, pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis.

Adapun Fenomena yang baru terjadi yaitu hasil survey *Transparency International* mencatat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) atau *Corruption Perceptions Index (CPI)* pada tahun 2019 naik di banding 2018. Skor IPK untuk Indonesia pada 2019 adalah 40, sedangkan tahun sebelumnya pada angka 38. Dengan skor 40, Indonesia berada di urutan ke-85 dari 180 negara di dunia dalam indeks persepsi korupsi. IPK atau CPI ini di hitung oleh *Transparency* internasional dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. (Detik.com 2020).

Teori Atribusi (Green and Mitchel, 1979) dalam Gifandi (2011), menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh atribut penyebab. Maka tindakan seorang pemimpin atau orang yang diberi kewenangan atau kekuasaan dipengaruhi oleh atribut penyebab. Tindakan kecurangan dapat dipengaruhi adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Teori *Fraud Triangle* yang dijabarkan Arens, Elder & Baslesy (2015:398), menyatakan bahwa korupsi juga disebabkan karena adanya 3 Kondisi yaitu: tekanan/Insentif (*Preceived pressure*), Kesempatan (*Preceived opportunity*), Sikap dan Rasionalisasi (*rationalization*).

Menurut PP No. 8 Tahun 2006 pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Menurut Arens, Elder & Basley (2015:345), pengendalian internal meliputi lima elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilai resiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Elemen-elemen tersebut membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian, dan suatu instansi baik pemerintah maupun swasta masih banyak terjadi kecurangan akuntansi karena pengendalian internal yang masih sangat lemah. Sehingga sangat mudah bagi oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan melakukan kecurangan akuntansi.

Adapun fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com (2018) menerangkan bahwa OJK resmi mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlina, Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Sebagai informasi, Laporan Keuangan Tahunan SNP Finance sebelumnya telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya sehingga dapat menyebabkan kerugian banyak pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan telah dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, OJK menilai bahwa AP Marlina dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan

Publik dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Maraknya tindak kecurangan akuntansi di Indonesia menyebabkan timbulnya faktor lain yaitu kesesuaian kompensasi. Pemberian kompensasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kompensasi menurut Riniwati (2016:181) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan perusahaan. Biasanya karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan. Salah satu akibat fatal dari ketidaksesuaian kompensasi adalah kecurangan akuntansi.

Kesesuaian Kompensasi merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya Kecurangan Akuntansi. Kecurangan terjadi karena ketidaksesuaian imbalan yang diterima pegawai dengan yang dikerjakan sehingga mengakibatkan pegawai untuk melakukan tindak kecurangan. Fenomena ini dikuatkan dengan riset yang dilakukan oleh Jobplanet (2016), terungkap bahwa gaji rata-rata dosen di Indonesia adalah Rp3.326.700,00 per bulan. Kecilnya gaji mengakibatkan dosen terpaksa bekerja ditempat lain atau dengan memanfaatkan wewenangnya untuk memperoleh keuntungan. Misal; memperjual belikan nilai (Kompas.com, 2016).

Menurut Suwanto dan Priansa (2013:220) kompensasi perlu dibedakan dengan gaji dan upah, karena konsep kompensasi tidak sama dengan konsep gaji atau upah. Gaji dan upah merupakan salah satu bentuk konkret atas pemberian kompensasi. Untuk lebih jelasnya, kompensasi itu bukan hanya berupa gaji atau upah, tetapi hal-hal lainnya. Sedangkan menurut Edwin dalam Suwanto dan Priansa (2013:220) kompensasi merupakan pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberi sumbangan kepada pencapaian organisasi.

Selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas, kesesuaian kompensasi juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan akuntansi. Kompensasi adalah berupa uang bukan uang (*natura*), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Kompensasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap sikap karyawan. Biasanya karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Faktor lain yang menyebabkan maraknya tindak kecurangan akuntansi di Indonesia adalah ketaatan aturan akuntansi. Aturan akuntansi memberikan pedoman bagi manajemen dalam melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan besar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Rahmawati (2012) aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, ketaatan aturan akuntansi juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Ketaataan aturan akuntansi memberi pedoman manajemen dalam melaksanakan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bagi pihak yang berkepentingan.

Dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, terdapat dua kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Menurut amin widjaja (2013) dan Shintadevi (2015:114) kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap

suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah, sedangkan kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dilakukan karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan tempat bekerja. Kecurangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi organisasi atau lembaga itu sendiri.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi telah banyak dilakukan Indriani, Syam, & Abdullah (2018:1234) mengungkapkan bahwa efektivitas sistem kontrol internal, gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, budaya dan organisasi etnis, komitmen organisasi dan penegakan hukum berdampak pada kecurangan akuntansi dalam SKPD Plidie Jaya secara simultan atau sebagian. Penelitian lain juga dilakukan oleh Dewi (2017:1443) mengungkapkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi kesesuaian maka kecenderungan kecurangan akuntansi juga akan semakin turun. ini di dalam perusahaan pemimpin dan staf akuntansi telah memberikan maupun menerima kompensasi yang sesuai sehingga dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Taat terhadap aturan akuntansi dapat memperkecil perilaku curang, bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor. Perilaku Tidak Etis dapat memberikan pengaruh terhadap terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi di dalam suatu manajemen. Dan juga penelitian lainnya dilakukan oleh Tarigan (2016:896) yang mengungkapkan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi:

### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana dan referensi dibidang akuntansi sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang terkait dan sejenis sebagai rekomendasi penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

### 2. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Program S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, serta dapat memberikan masukan untuk menambah wawasan dan referensi bagi diri mereka mengenal pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.

### 3. Bagi Perusahaan dan Manajemen

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan agar dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga dapat memberikan masukan kepada perusahaan agar dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi dalam perusahaan.